



PEMKAB  
MAJALENGKA

**BerAKHLAK**  
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan  
Berakhlak Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

---

# 2023



## DINAS PENDIDIKAN



## KATA PENGANTAR






Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2023.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.


Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Raharja. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya. Kami terus beradaptasi dan berinovasi demi menghasilkan yang terbaik untuk masyarakat Majalengka.

Diketahui oleh :

Sekretaris Dinas	
Kepala Bidang SD	
Kepala Bidang SMP	
Kepala Bidang PAUD DIKMAS	
Kepala Bidang GTK	

Majalengka, 28 Pebruari 2024  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Majalengka



  
Dr. Hj. Lilis Yuliasih, M.Pd  
Pembina Utama Muda

NIP. 19640730 198512 2 001



KATA PENGANTAR



DAFTAR ISI



BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

DATA KEPEGAWAIAN

ISI STRATEGIS

SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

PERKIN 2023

RENCANA ANGGARAN 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

AKUNTABILITAS KEUANGAN



BAB IV PENUTUP



LAMPIRAN

# Daftar Isi



# BAB 1

## PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan



## **BAB I PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

### **1.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan**

#### **a. Kedudukan**

Kedudukan berdasarkan Peraturan Bupati No 69 Tahun 2021 Sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Bupati No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup No 69 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **b. Tugas dan Fungsi**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan; dan



e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. **Bagan Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahi:

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Aset Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahi:

1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Aset Sekolah Dasar;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:

1. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
2. Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Aset Sekolah Menengah Pertama;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi:

1. Seksi Pembinaan Pendidik;
2. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional,

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal.



## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

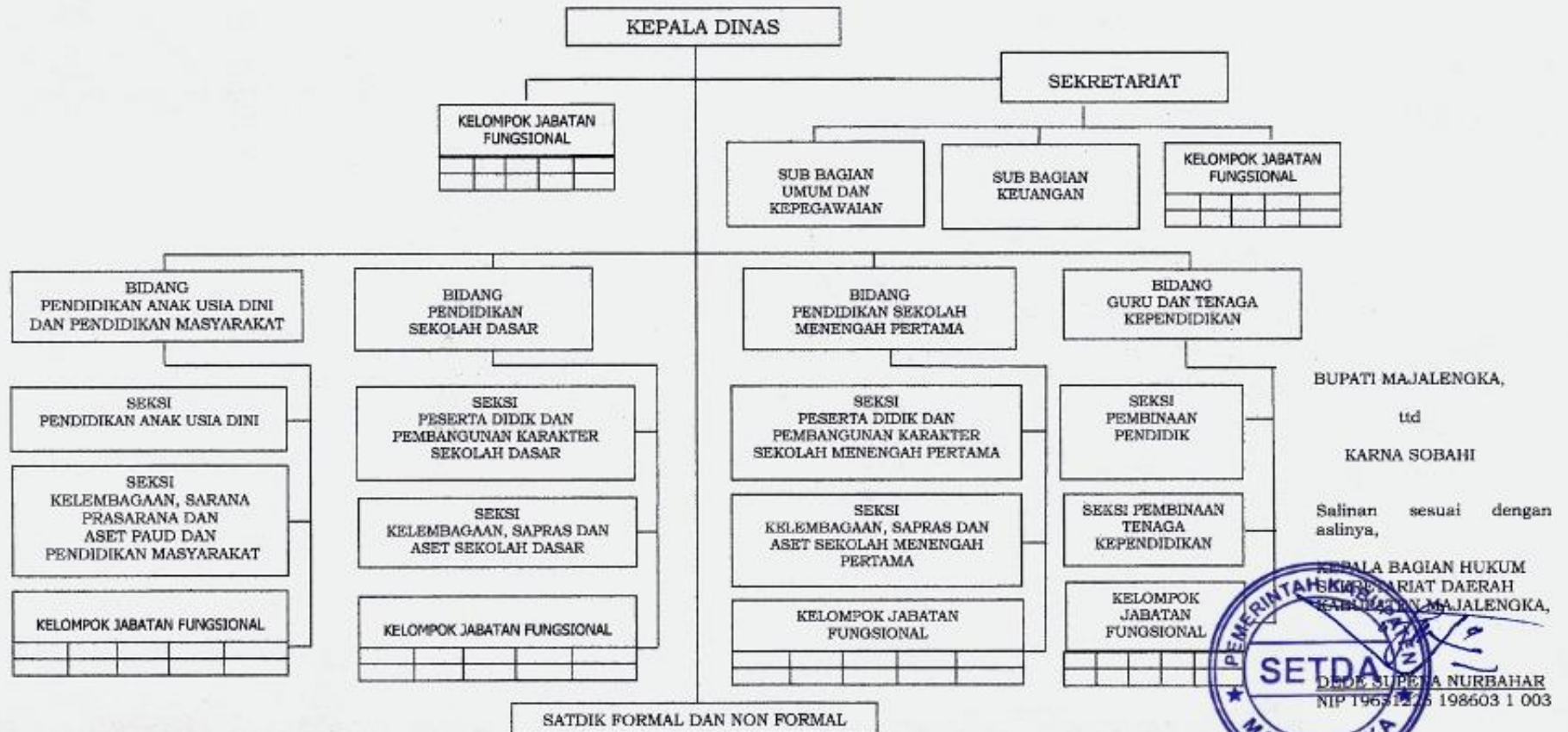
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 69 TAHUN 2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA



# INFOGRAFIKASN DINAS PENDIDIKAN

Laki-laki

2907 Orang



Perempuan

4779 Orang



Eselon



II B 1

III A 1

III B 4

IV A 10

IV B 1

I

II

III

IV

PNS

1

73

2251

2322

VIII

IX

X

XI

PPPK

-

3040

-

-



Golongan

Jenis Jabatan



STRUKTURAL

17

PELAKSANA

158

FUNGSIONAL

7511



SD SLTP/SLTA D1 D2 D3 D4 S1 S2 S3



Pendidikan





## 1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2023 berjumlah 7.686 orang dengan rincian sebagai berikut:

### a. Jenis Kelamin

Perempuan : 4.779 orang

Laki-laki : 2.907 orang

### b. Eselon

Eselon II b : 1 orang

Eselon III a : 1 orang

Eselon III b : 4 orang

Eselon IV a : 10 orang

Eselon IV b : 1 orang

### c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol IX
PNS	1	73	2251	2322	
PPPK					3040

### d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi: 1 Orang

Jabatan Administrator: 5 Orang

Jabatan Pengawas: 11 Orang

Jabatan Fungsional : 7511 Orang

Jabatan Pelaksana: 158 Orang

### e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
	10	104	4	71	12	7258	222	5



### 1.3 Isu Strategis

Isu Strategis Pembangunan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan berkeadilan di setiap desa, karena masih banyak anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani pada jenjang pendidikan anak usia dini;
- b. Kurangnya layanan penyelenggaraan pendidikan menengah yang bermutu, merata, terjangkau, setara dan relevan serta berkeadilan di setiap kecamatan karena masih rendahnya jumlah penduduk yang terlayani pada jenjang pendidikan menengah;
- c. Masih rendahnya lulusan peserta didik sekolah menengah pertama untuk melanjutkan pendidikannya pada jenjang sekolah menengah atas;
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas sumber daya manusia yang terampil dan potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Masih rendahnya kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan termasuk masih banyaknya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar kompetensi dan standar pelayanan minimal pendidikan serta prestasi pendidik dan tenaga kependidikan yang masih belum optimal;
- f. Belum terintegrasinya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produktif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur belum terselenggara secara optimal di seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- g. Penyelenggaraan sistem tata kelola, tata nilai sumber daya aparatur dan layanan birokrasi internal manajemen pendidikan yang belum optimal dalam melaksanakan layanan prima pendidikan termasuk belum efektifnya pengawasan dalam pelaksanaan anggaran dan bantuan pendidikan.



- h. Pandemi covid-19 berdampak adanya perubahan target capaian kinerja Dinas Pendidikan.
- i. Perubahan Regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- j. Budaya yang menganggap pendidikan bagi anak perempuan tidak penting dibandingkan anak laki-laki
- k. Kondisi geografis tempat tinggal peserta didik yang terpencil sulit menjangkau lokasi kegiatan/sekolah.

#### **1.4 Sistematika Pelaporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Pendidikan serta SK Tim Penyusunan LKIP.

# BAB 2

## PERENCANAAN KINERJA

### RENSTRA

### PERKIN 2023

### Rencana Anggaran 2023



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Rencana Strategis

Strategis dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Dinas Pendidikan dalam menyukseskan sasaran dan tujuan pemerintah Kabupaten Majalengka yaitu :

**“Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA”**

mengacu pada RPJMD Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 Nomor 4 Tahun 2022, terdapat penetapan strategis dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah di bidang pendidikan, sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut ini :

MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatnya Mutu pendidikan

Pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan periode 2018-2023 sebelum perubahan terdiri dari 8 program dan setelah perubahan menjadi 2 program sebagaimana perubahannya tersaji pada tabel berikut ini



Program dan indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2019

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun 2019
1	Program Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pendidikan	Persen	100	100
2	Program Peningkatan Prestasi Masyarakat	Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan terakreditasi	LPK	18	18
3	Program Peningkatan Kompetensi Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Persen	6,9	7,00
4	Program Penguatan Karakter Melalui Pendidikan Formal dan Non Formal	Peningkatan Kualitas Apektif Anak Sekolah	Persen	39,9	40
5	Program Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	104,5	104,6
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	99,92	99,92
6	Program Pendidikan PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK)PAUD	Persen	65,01	65,02
7	Program Pendidikan Non Formal	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Persen	12,11	12,12
8	Program Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang Refresentatif	persen	93,75	93,75



Program dan indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2020

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun 2020
1	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Urusan Pendidikan	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah Lingkup Urusan Pendidikan	Persen	100	100
2	Program Keberlangsungan Pendidikan Keluarga Miskin	Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (SD dan SMP) Masyarakat Miskin	Persen	0	0
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Urusan Pendidikan	Tingkat Pemenuhan Sarana Prasarana Kerja Lingkup Urusan Pendidikan	persen	100	100
4	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi serta Pelaporan Capaian Kinerja Urusan Pendidikan	Tingkat Kesesuaian Perencanaan dan Pelaporan Daerah dengan Perangkat Daerah Urusan Pendidikan	persen	100	100
5	Program Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD/MI	persen	104,6	104,9
6	Program Pendidikan SMP	APK SMP/MTs	persen	99,93	101,2
7	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	APK PAUD	persen	65,02	65,49
		Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	persen	7,02	7,04
		Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS)	persen	12,21	12,17
8	Program Penguatan Tata Kelola Pendidikan	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang Refresentatif	Persen	93,75	93,80
9	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	orang	195	200
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan terakreditasi	persen	89	90



Program dan indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2021-2022

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun	
					2021	2022
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Hurup	BB	BB	BB
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Hurup	BB	BB	BB
		Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	100
2	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD/MI	Persen	97,1	97,1	97,30
		APM SMP/MTs	Persen	98,02	98,02	98,35
		APM PAUD	Persen	99,32	99,32	99,40
		APK Non Formal	Persen	86,00	86,00	86,40
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	Persen	16,18	16,18	16,18





Program dan indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2023

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap tahun 2023
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Nilai	12,25	12,25
		Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Nilai	7,25	7,25
2	Program Pengelolaan Pendidikan	APM SD/MI	Persen	97,1	97,35
		APM SMP/MTs	Persen	98,02	98,55
		APM PAUD	Persen	99,32	99,45
		APK Non Formal	Persen	86,00	86,55



## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berikut tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) selama lima tahun dengan target sebelum dan setelah perubahan:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Indek Pengetahuan	Point	56,89	58,84	59,55	60,23	61,19	56,89	57,90	58,20	58,80	59,44	
			Rata-rata Lama sekolah (RLS)	Tahun	7,00	7,04	7,28	7,34	7,53	7,00	7,04	7,28	7,34	7,53	
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,12	12,17	12,23	12,37	12,25	12,12	12,17	12,23	12,37	12,25	
			APK SD/MI	Persen	104,6	104,9	105,3	105,6	105,9	104,6	104,9	105,3	105,6	105,9	
			APK SMP/MTs	Persen	99,92	101,2	101,6	101,7	101,9	99,92	101,2	101,6	101,7	101,9	
			Indek Pengetahuan	Point	56,89	58,84	59,55	60,23	61,19	56,89	57,90	58,20	58,80	59,44	
			APM SD/MI	Persen								97,10	97,30	97,35	
			APM SMP/MTs	Persen								98,02	98,35	98,55	
			APM PAUD	Persen								99,32	99,40	99,45	
APK	Persen								86,00	86,40	86,55				



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan					Target Setelah Perubahan				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	99	10	11	12	13	14	15
			Kesetaraan											
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun										12,25
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun										7,25
			APM SD/MI	Persen								97,10	97,30	97,35
			APM SMP/MTs	Persen								98,02	98,35	98,55
			APM PAUD	Persen								99,32	99,40	99,45
			APK Kesetaraan	Persen								86,00	86,40	86,55

Sebagaimana Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2018-2023 yang mengalami perubahan, maka Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan RPJMD yang mengalami perubahan, juga untuk meningkat kualitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.



## Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,25	Tahun
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,52	Tahun
		APM SD/MI	97,35	Persen
		APM SMP/MTs	98,55	Persen
		APM PAUD	99,45	Persen
		APK Kesetaraan	86,55	Persen

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkan Rencana Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun 2023 yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan

Dalam upaya melaksanakan program dan kegiatannya Dinas Pendidikan menetapkan Anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 974.016.489.660,- tetapi pada bulan Nopember tahun 2023 ada perubahan jumlah anggaran, dimana ada tambahan dana Bantuan Keuangan dari Provinsi sehingga jumlah anggaran Dinas Pendidikan tahun 2023 sebesar Rp. 1.045.412.281.767,-.

### Rencana Program Dinas Pendidikan Tahun 2023

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
PENDAPATAN		
- DAU	564.871.172.817	54,03
- DAK Fisik	27.950.784.950	2,67
- DAK Non Fisik	402.131.819.000	38,47



Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
- Bankeu	50.458.505.000	4,83
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.045.412.281.767</b>	<b>100</b>
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	497.612.990.397	47,60
- Program Pengelolaan Pendidikan	547.799.291.370	52,40
<b>PENGELUARAN</b>	<b>1.030.091.041.415</b>	<b>98,53</b>
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	492.677.264.266	99,01
- Program Pengelolaan Pendidikan	537.413.777.149	98,10
<b>SALDO</b>	<b>15.321.240.352</b>	<b>1,47</b>

# BAB 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

### Pengukuran Kinerja 2023

### Analisis Capaian Kinerja

### Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 85.39%. Sebanyak 2 indikator pencapaian kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 4 indikator tidak mencapai 100%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:

### Capaian IKU





## BAB III AKUNTABILITASI KINERJA

### 3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka merupakan suatu proses untuk mengevaluasi sejauh mana dinas pendidikan telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran ini penting untuk memantau efektivitas program dan kebijakan pendidikan serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan atau peningkatan.

Capaian Dinas Kabupaten pada tahun tercermin dari yang terdapat Renstra Dinas Pendidikan. kinerja merupakan berbagai yang antara lain kebijakan, dan kegiatan inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Capaian tersebut terperinci pada tabel berikut ini.



kinerja Pendidikan Majalengka 2023 6 indikator dalam

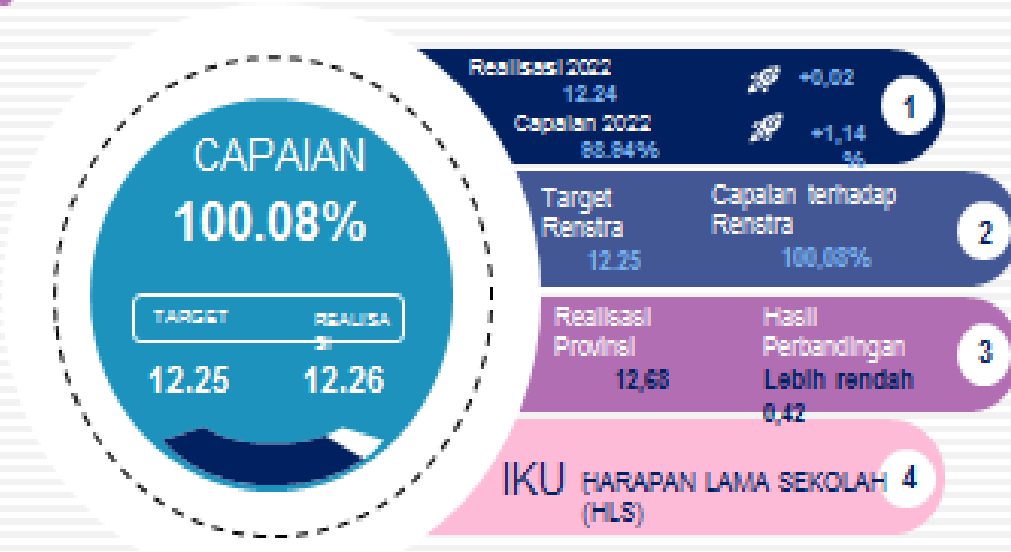
Capaian tersebut hasil dari upaya dilakukan strategi, program termasuk

Target dengan Realisasi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Mutu Pendidikan	HLS	12,25	12,26	100
		RLS	7,52	7,52	100
		APM SD/MI	97,35	90,91	93,38
		APM SMP/MTs	98,55	85,12	86,37
		APM PAUD	99,45	80,99	81,44
		APK Nonformal	86,55	44,22	51,09



# MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN



## FAKTOR

- Peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan
- Peningkatan kualitas pendidikan
- Penyediaan dukungan finansial dan pemberian bantuan kepada siswa dari keluarga miskin

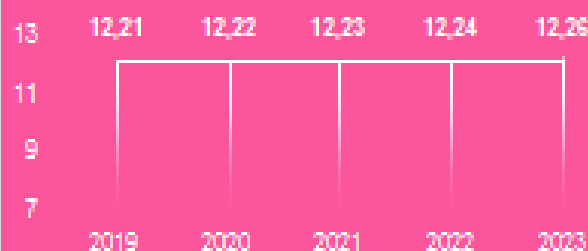
- Program Pengelolaan Pendidikan

## PROGRAM

## EFISIENSI

- Efisiensi atas capaian Indikator Harapan Lama Sekolah pada sasaran meningkatnya mutu pendidikan sebesar 0.08%

## HLS







### 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah rata-rata tahun yang diharapkan seorang individu akan menghabiskan dalam sistem pendidikan formal. Ini mencerminkan ekspektasi atau harapan masyarakat terhadap durasi waktu yang dianggap ideal untuk menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu.

HLS dijadikan salah satu indikator kinerja utama Dinas Pendidikan kabupaten Majalengka yang ditetapkan pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Renstra Perubahan Dinas Pendidikan periode 2018-2023.

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya mutu pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,25	12,26	100,08%

Capaian Harapan Lama Sekolah penduduk kabupaten Majalengka pada tahun 2023 sebesar 100,08%, dengan realisasi sebesar 12,26 dari target 12,25.

Ketercapaian target kinerja harapan lama sekolah (HLS) yang merupakan salah satu indikator kinerja Utama Dinas Pendidikan ini sangatlah dipengaruhi oleh berbagai aspek penunjang baik dari segi kebijakan pendidikan, sosial, maupun ekonomi.

Salah satu upaya tercapainya target harapan lama sekolah adalah dengan meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendidikan, seperti sekolah dan fasilitas pembelajaran. Sebagaimana tertuang pada program dan kegiatan pengelolaan pendidikan dengan anggaran yang bersumber pada DAU, DAK dan Bankeu dengan peruntukan diantaranya untuk pembangunan ruang





kelas, Rehabilitasi dan pengadaan perlengkapan sekolah.

Selain peningkatan aksebiltas pendidikan, untuk peningkatan HLS Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka juga menyelenggarakan program bantuan kepada siswa miskin berupa perlengkapan siswa . Program bantuan ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya mutu pendidikan	Harapan lama sekolah (HLS)	12,26	12,24	0,02

Bila dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022, harapan lama sekolah sudah melampaui target dan mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,02.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya mutu pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	100,08%	98,94%	1,14

Bila dibandingkan capaian HLS tahun 2023 dengan capaian HLS tahun 2022 ada peningkatan capaian sebesar 1,14 meskipun HLS belum ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Dinas Pendidikan kabupaten Majalengka. HLS ditetapkan tahun 2023 sebagai indikator kinerja utama pada Renstra perubahan 2018-2023 untuk penyelarasan dengan pohon kinerja Dinas Pendidikan. Adapun capaian nilai HLS berdasarkan hasil analisa dan perhitungan BPS Kabupaten Majalengka setiap tahunnya.

## Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya mutu pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,26	12,25	100,08%



Jika membandingkan realisasi tahun 2023 dengan renstra tahun 2018-2023 capaian tahun 2023 sudah mencapai 100,08% dengan kondisi akhir sebesar 12,26.

### 3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan harapan lama sekolah Provinsi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya mutu pendidikan	Harapan lama sekolah (HLS)	12,26	12,68	0,42

Jika harapan lama sekolah penduduk Majalengka dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk di provinsi Jawa Barat, lebih rendah 0,42. Hal ini dikarenakan Perbedaan aksesibilitas terhadap pendidikan, termasuk jarak ke sekolah dan ketersediaan transportasi dikabupaten Majalengka sangat berbeda dengan aksesibilitas di tingkat provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil analisis BPS provinsi Jawa Barat tahun 2023 dimana kabupaten Majalengka dengan tingkat kemiskinan berada pada urutan ke 4 (11,21%) diprovinsi Jawa Barat yang memungkinkan pemerintah kabupaten Majalengka kesulitan dalam menyediakan dukungan finansial yang cukup bagi masyarakatnya untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hal ini menyebabkan capaian harapan lama sekolah di kabupaten Majalengka lebih rendah dibandingkan capaian tingkat provinsi Jawa Barat.

Wilayah Jawa Barat	Persentase Penduduk Miskin (Persen)		
	2021	2022	2023
Provinsi Jawa Barat	8,40	8,06	7,62
Bogor	8,13	7,73	7,27
Sukabumi	7,70	7,34	7,01
Cianjur	11,18	10,55	10,22
Bandung	7,15	6,80	6,40
Garut	10,65	10,42	9,77
Tasikmalaya	11,15	10,73	10,28
Ciamis	7,97	7,72	7,42
Kuningan	13,10	12,76	12,12
Cirebon	12,30	12,01	11,20
Majalengka	12,33	11,94	11,21
Sumedang	10,71	10,14	9,36
Indramayu	13,04	12,77	12,13



4. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan /kegagalan capaian harapan lama sekolah.**

1. Peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan transportasi, dapat memberikan peluang bagi siswa untuk menghadiri sekolah dan menyelesaikan pendidikan.
2. Peningkatan kualitas pendidikan, termasuk kualifikasi guru, kurikulum yang relevan, dan metode pengajaran yang efektif, dapat berkontribusi pada peningkatan Harapan Lama Sekolah.
3. Penyediaan dukungan finansial dan bantuan seperti beasiswa untuk keluarga miskin. Beasiswa salah satu upaya membantu siswa yang mungkin menghambat kemampuan mereka untuk menyelesaikan pendidikan.

**Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan capaian harapan lama sekolah tahun 2023.**

1. Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan anggaran Rp. 3.100.661.000 sebanyak 16 ruang, sarana prasarana dan utilitas sekolah dengan anggaran Rp. 10.095.934.950 sebanyak 25 paket untuk peningkatan aksesibilitas pendidikan.
2. Rehabilitasi ruang kelas dengan anggaran Rp. 39.157.868.250 sebanyak 352 ruang, sarana prasarana dan utilitas sekolah dengan anggaran Rp. 864.556.950 sebanyak 13 ruang.
3. Penyaluran dukungan finansial seperti pemberian bantuan perlengkapan untuk siswa dari keluarga miskin sebesar Rp.438.710.000 sebanyak 1.861 orang jenjang PAUD/SD/SMP dan penyaluran dana operasional sekolah (BOS)/BOP untuk jenjang SD sebesar





- Rp. 108.795.292.952 sebanyak 671 SD, jenjang SMP sebesar Rp. 46.211.627.048 sebanyak 118 SMP, jenjang PAUD Rp.17.522.390.000 sebanyak 800 PAUD dan Dikmas sebesar Rp. 12.845.450.000 sebanyak 31 PKBM.
4. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan sebagai upaya peningkatan kualifikasi pendidikan, relevansi kurikulum yang berlaku dengan anggaran Rp. 406.314.700,- sebanyak 100 peserta.

**Upaya yang akan dilakukan Dinas Pendidikan terhadap peningkatan capaian harapan lama sekolah.**

Peningkatan Harapan Lama Sekolah bukanlah hasil tunggal, melainkan serangkaian intervensi dan kebijakan yang saling terkait. Integrasi berbagai strategi dan pemahaman mendalam tentang konteks lokal dapat membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu upaya Dinas Pendidikan yang akan dilakukan kedepannya adalah pemanfaatan teknologi dan pendekatan pembelajaran elektronik sehingga dapat memperluas akses pendidikan dan meningkatkan fleksibilitas dalam memperoleh pengetahuan.

Selain itu Dinas Pendidikan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah yang dapat membantu memobilisasi sumber daya tambahan untuk mendukung pendidikan dan meningkatkan Harapan Lama Sekolah.

5. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

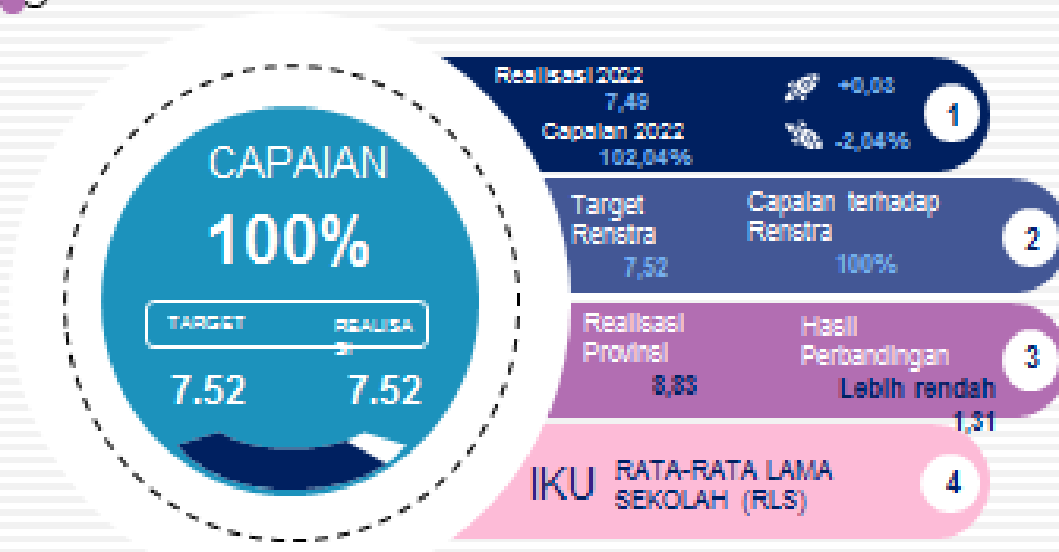
No.	Program	Pengampu	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang SD,SMP, PAUDDIK MAS	547.799.291.370

6. Efisiensi sumber daya

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator harapan lama sekolah pada sasaran meningkatnya mutu pendidikan yaitu 1,9 % atau sebesar Rp.10.385.514.221 dari pagu anggaran Rp. 547.799.291.370 dengan realisasi Rp. 537.413.777.149.



# MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN



## FAKTOR

- Partisipatif aktif masyarakat terhadap pentingnya pendidikan
- Tingkat kemampuan ekonomi masyarakat
- Peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan

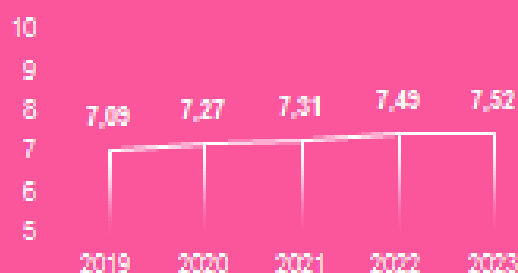
- Program Pengelolaan Pendidikan

## PROGRAM

## EFISIENSI

- Efisiensi atas capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah pada sasaran meningkatnya mutu pendidikan sebesar 0% atau mencapai target

## RLS





- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

RLS dijadikan salah satu indikator kinerja utama Dinas Pendidikan kabupaten Majalengka yang ditetapkan pada tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Renstra Perubahan Dinas Pendidikan periode 2018-2023.

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	7,52	7,52	100%

Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Majalengka pada tahun 2023 sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 7,52 dari target 7,52.

Ketercapaian angka rata-rata lama sekolah sebesar 100% dari target yang direncanakan ini menunjukkan keberhasilan Dinas Pendidikan dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dan terus melakukan pembaruan agar dapat mengatasi tantangan dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana penunjang pembelajaran, pengadaan perlengkapan sekolah juga pemberian bantuan kepada siswa dari keluarga miskin.



*Penyerahan bantuan perlengkapan siswa miskin dan sarana prasarana sekolah*



## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	7,52	7,49	0,3

Bila dibandingkan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022, rata-rata lama sekolah sudah melampaui target dan mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,3.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	100%	102,04%	2,04

Bila dibandingkan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun 2022, ada penurunan capaian sebesar 2,04 meskipun RLS belum ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Dinas Pendidikan kabupaten Majalengka. RLS ditetapkan tahun 2023 sebagai indikator kinerja utama pada Renstra perubahan 2018-2023 untuk penyelarasan dengan pohon kinerja Dinas Pendidikan. Adapun capaian nilai HLS berdasarkan hasil analisa dan perhitungan BPS Kabupaten Majalengka setiap tahunnya.

## 3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7,52	7,52	100%

Jika membandingkan realisasi tahun 2023 dengan Renstra tahun 2018-2023 capaian tahun 2023 sudah mencapai 100% dengan kondisi akhir sebesar 7,52. Hal ini juga bisa dilihat dari kenaikan jumlah siswa yang berpartisipasi di



*Kegiatan belajar di PKBM*





pendidikan kesetaraan pakat A, paket B dan paket C atau lembaga-lembaga pelatihan/kursus.

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7,52	8,83	-1,31

Jika dibandingkan rata-rata lama sekolah penduduk Majalengka dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk di provinsi Jawa Barat, lebih rendah 1,31. Dikarenakan implementasi kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten dan propinsi sangat berbeda, juga masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan termasuk penyelenggaraan pendidikan non formal yang setara.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan capaian rata-rata lama sekolah.**

1. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan partisipasi aktif dalam mendukung anak-anak nya menempuh pendidikan.
2. Tingkat kemampuan ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga dapat menjadi faktor penentu dalam memutuskan apakah anak-anak dapat melanjutkan pendidikan mereka setelah tingkat wajib belajar.
3. Peningkatan aksesibilitas terhadap pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan transportasi, dapat memberikan peluang bagi siswa untuk menghadiri sekolah dan menyelesaikan pendidikan.

**Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan capaian rata-rata lama sekolah tahun 2023.**

1. Dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendidikan seperti kegiatan School Garden



Harvest Festival dan Penanaman Micro Forest di SDN Surawangi 1.

2. Penyaluran dukungan finansial seperti pemberian bantuan perlengkapan untuk siswa dari keluarga miskin sebesar Rp.438.710.000 sebanyak 1.861 orang jenjang PAUD/SD/SMP dan penyaluran dana operasional sekolah (BOS)/BOP untuk jenjang SD sebesar Rp. 108.795.292.952 sebanyak 671 SD, jenjang SMP sebesar Rp. 46.211.627.048 sebanyak 118 SMP, jenjang PAUD Rp.17.522.390.000 sebanyak 800 PAUD dan Dikmas sebesar Rp. 12.845.450.000 sebanyak 31 PKBM.
3. Peningkatan aksesibilitas sarana pendidikan yang memadai terutama di wilayah yang terpencil, seperti pembangunan Ruang Kelas Baru dengan anggaran Rp. 3.100.661.000 sebanyak 16 ruang, sarana prasarana dan utilitas sekolah dengan anggaran Rp. 10.095.934.950 sebanyak 25 paket untuk peningkatan aksesibilitas pendidikan.
4. Diadakannya kerjasama dengan perguruan tinggi. Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan Optimalisasi Kapabilitas Berpikir Komputasional Berbasis Unplugged kerjasama dengan Universitas Perguruan Indonesia yang diikuti sebanyak 50 peserta.



**Upaya yang akan dilakukan Dinas Pendidikan terhadap peningkatan capaian rata-rata lama sekolah.**

1. Mengoptimalkan peran PKBM sebagai tempat Pendidikan.
2. Program keterampilan hidup dalam kurikulum untuk membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan sehari-hari.



6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

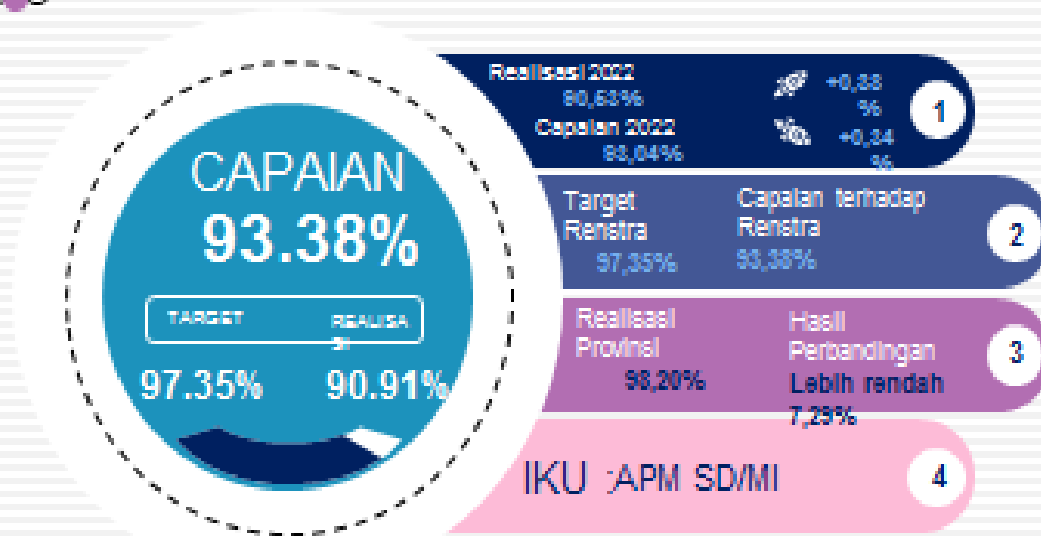
No.	Program	Pengampu	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang PAUDDIKMAS	13.451.815.000

7. Efisiensi sumber daya

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator rata-rata lama sekolah pada sasaran meningkatnya mutu pendidikan yaitu 2,76 % atau sebesar Rp. 370.750.800 dari pagu anggaran Rp. 13.451.815.000 dengan realisasi Rp. 13.081.064.200.



# MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN



## FAKTOR

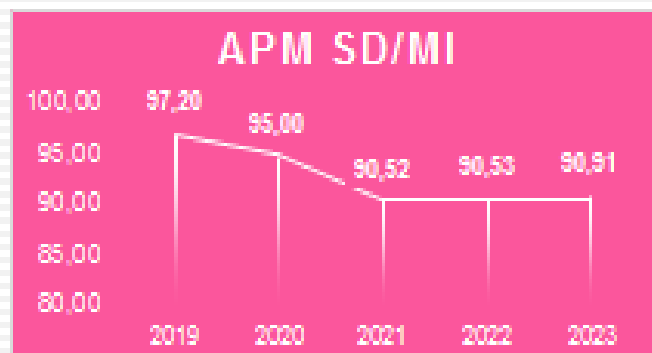
- Ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan yang memadai dan mudah diakses
- Kualitas pengajaran di sekolah
- Penyediaan dukungan finansial/pemberian bantuan kepada siswa dari keluarga miskin
- program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, kurikulum yang relevan dan menarik bagi siswa

- Program Pengelolaan Pendidikan (Sekolah Dasar)

## PROGRAM

## EFISIENSI

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis Ini tidak ada karena IKU tidak tercapai





- **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah sebuah indikator yang digunakan dalam bidang pendidikan untuk mengukur proporsi atau persentase populasi usia sekolah yang berada pada tingkat pendidikan tertentu, dibandingkan dengan total populasi usia sekolah di suatu negara atau wilayah pada tahun tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM) SD merujuk pada persentase atau proporsi anak-anak usia sekolah dasar (SD) yang berpartisipasi aktif dalam sistem pendidikan pada tingkat SD. Dalam istilah sederhana, APM SD mengukur seberapa banyak anak usia sekolah dasar (usia 7-12 tahun) yang mengikuti pendidikan dibandingkan dengan total populasi anak usia 7-12 tahun dalam suatu wilayah atau negara pada suatu periode waktu tertentu.

APM SD dijadikan salah satu indikator kinerja utama Dinas Pendidikan kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Renstra Perubahan Dinas Pendidikan periode 2018-2023. Adapun target yang dibebankan pada setiap tahun perencanaan selalu ditingkatkan.

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)SD	97,35	90,91	93,38%

Capaian Angka Partisipasi Murni SD/MI kabupaten Majalengka pada tahun 2023 sebesar 93,38%, dengan realisasi sebesar 90,91% dari target 97,35%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	90,91	90,53	0,38

Bila dibandingkan realisasi Angka Partisipasi Murni tahun 2023 dengan tahun 2022 mengalami peningkatan realisasi sebesar



0,38. Adapun target yang dibebankan pada setiap tahun perencanaan selalu ditingkatkan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2018-2023.

Peningkatan ketercapaian ini adalah hasil kerja keras Dinas Pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang merupakan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan.



Selain aksesibilitas fasilitas pendidikan dipenuhi, Dinas Pendidikan juga memastikan ketersediaan guru yang memadai dan berkualitas di setiap sekolah untuk memberikan pendidikan yang baik.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)SD	93,38	93,04	0,34

Bila dibandingkan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun 2022, angka parisipasi murni mengalami peningkatan sebesar 0,34.

### 3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)SD	90,91	97,35	93,38 %



Jika membandingkan realisasi APM SD/MI tahun 2023 dengan renstra tahun 2018-2023 capaian tahun 2023 sudah mencapai 93,38 dengan kondisi akhir sebesar 97,35.

4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)SD	90,91	98,20	-7,29

Angka partisipasi murni SD/MI kabupaten Majalengka jika dibandingkan dengan angka partisipasi murni provinsi Jawa Barat, lebih rendah 7,29. Dikarenakan masih kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai dan sarana belajar lainnya di kabupaten Majalengka dibandingkan dengan di provinsi, hal ini dapat memengaruhi partisipasi murid.

38 Provinsi	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan					
	SD/ sederajat			SMP/ sederajat		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
ACEH	98,95	99,07	98,97	86,95	88,21	84,85
SUMATERA UTARA	97,69	98	97,95	81,13	81,84	82,09
SUMATERA BARAT	98,82	98,8	98,89	78,75	78,86	80,22
RIAU	97,85	97,8	98,13	80,52	80,43	80,76
JAMBI	99,41	99,33	99,33	79,88	79,93	80,23
SUMATERA SELATAN	98	98,08	98,12	78,31	78,68	79,12
BENGKULU	98,61	98,6	98,61	80,25	80,25	81,08
LAMPUNG	99,1	99,29	99,22	82,03	82,07	80,64
KEP. BANGKA BELITUNG	97,89	98,01	98,11	74,6	74,68	77
KEP. RIAU	99,26	99,2	99,29	86,6	86,76	86,78
DKI JAKARTA	98,22	98,37	98,44	83,01	84,22	84,95
JAWA BARAT	98,37	98,29	98,2	82,88	82,8	83,61
JAWA TENGAH	98,22	98,39	98,46	80,99	81,02	81,56
DI YOGYAKARTA	99,44	99,43	99,36	83,62	85,28	85,62
JAWA TIMUR	97,9	98,09	98,04	83,8	83,8	83,91

- Sumber: BPS-RI, Susenas 2003-2017



5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan capaian angka partisipasi murni SD/MI.**

1. Ketersedian dan aksesibilitas pendidikan yang memadai dan mudah diakses, seperti sekolah, kelas, perpustakaan, dan sarana belajar lainnya, dapat mendorong partisipasi siswa.
2. Kualitas pengajaran di sekolah dengan menyediakan guru yang terlatih dan berkualitas dapat meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran.
3. Memberikan bantuan keuangan, seperti beasiswa atau bantuan pendidikan, kepada keluarga yang membutuhkan dapat membantu mengatasi kendala ekonomi yang mungkin menjadi hambatan partisipasi.
4. Merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mengembangkan kurikulum yang relevan dan menarik bagi siswa.

**Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan terhadap peningkatan capaian angka partisipasi murni SD/MI.**

1. Pembangunan sarana prasarana pendidikan seperti ruang kelas baru dengan anggaran 1.480.000.000 sebanyak 7 ruang , ruang perpustakaan dengan anggaran Rp. 558.000.000 sebanyak 3 ruang.
2. Rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas pendidikan yang memadai seperti rehabilitasi ruang kelas dengan anggaran Rp. 29.380.369.550 sebanyak 279 ruang, rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas sekolah sebesar Rp. 210.036.650 sebanyak 3 ruang.
3. Pengadaan sarana perlengkapan sekolah seperti







- pengadaan mebel dengan anggaran Rp.1.719.000.000 sebanyak 95 paket.
4. Mengadakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan dengan anggaran Rp.406.314.700,- sebanyak 100 orang
  5. Memberikan bantuan perlengkapan bagi siswa dari keluarga miskin dengan anggaran Rp.168.210.000 untuk 211 siswa

**Upaya yang akan dilakukan Dinas Pendidikan terhadap peningkatan capaian angka partisipasi murni SD/MI.**

1. Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung upaya peningkatan APM SD.
2. Merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mengembangkan kurikulum yang relevan dan menarik bagi siswa.
3. Menyelenggarakan pendidikan inklusif di setiap jenjang pendidikan.
4. Menyediakan fasilitas pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus seperti penyediaan guru yang sudah mengikuti pelatihan khusus dan pemberian bantuan alat khusus.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

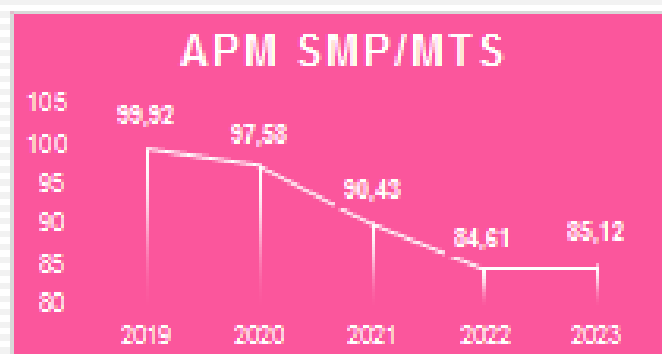
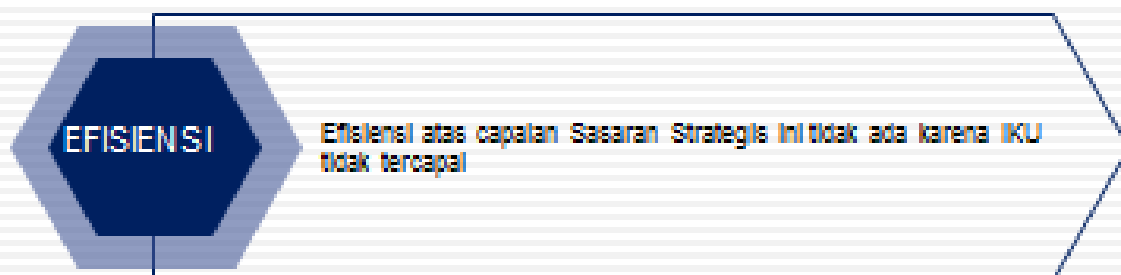
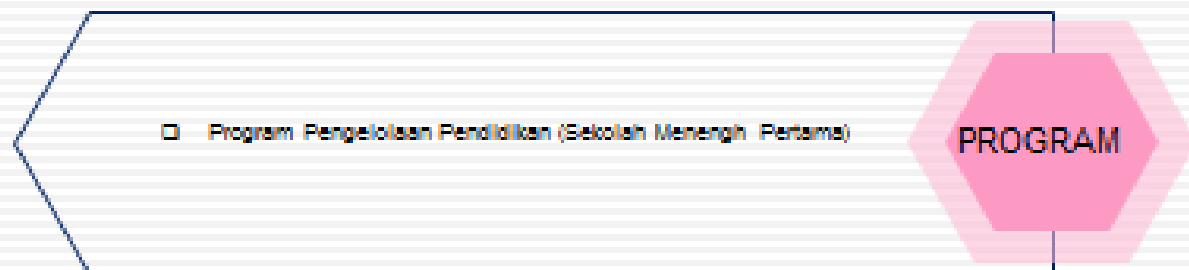
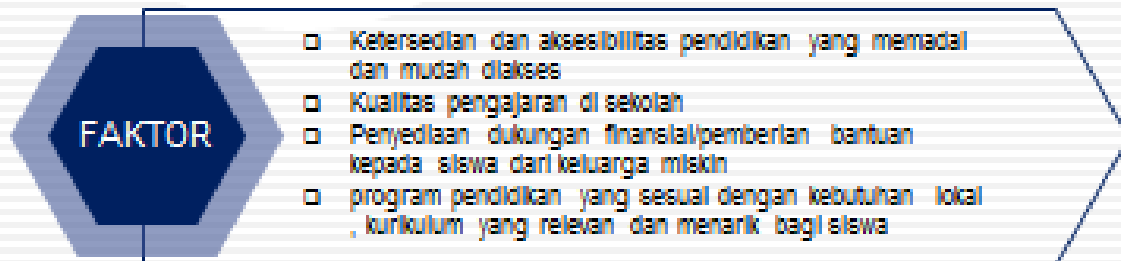
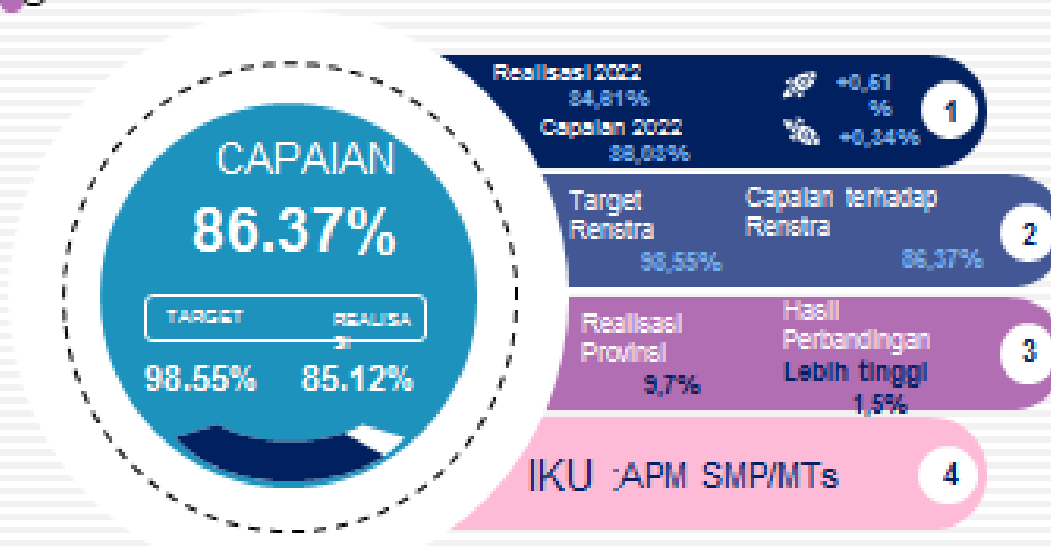
No.	Program	Pengampu	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang SD	409.537.608.022

7. Efisiensi sumber daya

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator angka partisipasi murni SD/MI pada sasaran meningkatnya mutu pendidikan tidak ada karena IKU hanya mencapai 93,38%.



# MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN





• **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah sebuah indikator yang digunakan dalam bidang pendidikan untuk mengukur proporsi atau persentase populasi usia sekolah yang berada pada tingkat pendidikan tertentu, dibandingkan dengan total populasi usia sekolah di suatu negara atau wilayah pada tahun tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP merujuk pada persentase atau proporsi anak-anak usia sekolah menengah pertama (SMP) yang berpartisipasi aktif dalam sistem pendidikan pada tingkat SMP. Dalam istilah sederhana, APM SMP mengukur seberapa banyak anak usia sekolah menengah pertama (usia 13-15 tahun) yang mengikuti pendidikan dibandingkan dengan total populasi anak usia 13-15 tahun dalam suatu wilayah atau negara pada suatu periode waktu tertentu.

APM SMP dijadikan salah satu indikator kinerja utama Dinas Pendidikan kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Renstra Perubahan Dinas Pendidikan periode 2018-2023. Adapun target yang dibebankan pada setiap tahun perencanaan selalu ditingkatkan.

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	98,55	85,12	86,37%

Capaian Angka Partisipasi Murni SMP/MTs kabupaten Majalengka pada tahun 2023 sebesar 86,37%, dengan realisasi sebesar 85,12 dari target 97,35.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	85,12	84,61	0,51

Bila dibandingkan realisasi Angka Partisipasi Murni SMP/MTs tahun 2023 dengan tahun 2022 mengalami peningkatan



realisasi sebesar 0,51. Adapun target yang dibebankan pada setiap tahun perencanaan selalu ditingkatkan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2018-2023.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	86,37	86,03	0,34

Bila dibandingkan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun 2022, angka partisipasi murni SMP/MTs juga mengalami peningkatan sebesar 0,34.

### 3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	85,12	98,55	86,37 %

Jika membandingkan realisasi angka APM SMP/MTs tahun 2023 dengan Renstra tahun 2018-2023 capaian tahun 2023 sudah mencapai 86,37% dengan kondisi akhir sebesar 98,55.

### 4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	85,12	83,61	1,51



Jika dibandingkan angka partisipasi murni kabupaten Majalengka dibandingkan dengan angka partisipasi murni provinsi Jawa Barat, lebih tinggi 1,31.

38 Provinsi	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan					
	SD/ sederajat			SMP/ sederajat		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
ACEH	98,95	99,07	98,97	86,95	88,21	84,85
SUMATERA UTARA	97,69	98	97,95	81,13	81,84	82,09
SUMATERA BARAT	98,82	98,8	98,89	78,75	78,86	80,22
RIAU	97,85	97,8	98,13	80,52	80,43	80,76
JAMBI	99,41	99,33	99,33	79,88	79,93	80,23
SUMATERA SELATAN	98	98,08	98,12	78,31	78,68	79,12
BENGGKULU	98,61	98,6	98,61	80,25	80,25	81,08
LAMPUNG	99,1	99,29	99,22	82,03	82,07	80,64
KEP. BANGKA BELITUNG	97,89	98,01	98,11	74,6	74,68	77
KEP. RIAU	99,26	99,2	99,29	86,6	86,76	86,78
DKI JAKARTA	98,22	98,37	98,44	83,01	84,22	84,95
JAWA BARAT	98,37	98,29	98,2	82,88	82,8	83,61
JAWA TENGAH	98,22	98,39	98,46	80,99	81,02	81,56
DI YOGYAKARTA	99,44	99,43	99,36	83,62	85,28	85,62
JAWA TIMUR	97,9	98,09	98,04	83,8	83,8	83,91

- Sumber: BPS-RI, Susenas 2003-2017

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan capaian angka partisipasi murni SMP/MTs.**

1. Ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan yang memadai dan mudah diakses, seperti sekolah, kelas, perpustakaan, dan sarana belajar lainnya, dapat mendorong partisipasi siswa.
2. Kualitas pengajaran di sekolah dengan menyediakan guru yang terlatih dan berkualitas dapat meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran.
3. Memberikan bantuan keuangan, seperti beasiswa atau bantuan pendidikan, kepada keluarga yang membutuhkan dapat membantu mengatasi kendala ekonomi yang mungkin menjadi hambatan partisipasi.



4. Merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mengembangkan kurikulum yang relevan dan menarik bagi siswa.

**Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan terhadap peningkatan capaian angka partisipasi murni SMP/MTs.**

1. Pembangunan sarana prasarana pendidikan seperti ruang kelas laboratorium dengan anggaran Rp. 3.050.250.000 sebanyak 7 ruang. Sarana utilitas sebesar Rp. 3.721.754.400,- sebanyak 14 kegiatan.



*Rehabilitasi ruang kelas SMP 2 Dawuan*

2. Rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas pendidikan yang memadai seperti rehabilitasi ruang kelas dengan anggaran Rp. 9.134.111.250 sebanyak 67 ruang.

3. Pengadaan alat praktik dan peraga sekolah dengan anggaran Rp. 9.425.225.000 sebanyak 108 unit.



*Pemberian bantuan Al Qur'an Braille untuk anak disabilitas*

4. Menyelenggarakan pendidikan inklusif di setiap jenjang pendidikan. Dinas pendidikan menyalurkan bantuan al qur'an braile dari Sam'an Netra.

5. Mengadakan lokarya program pendidikan penggerak angkatan 9 sebanyak 195 peserta



**LOKAKARYA 2 PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENGGERAK ANGKATAN 9  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**



6. Memberikan bantuan perlengkapan bagi siswa dari keluarga miskin sebesar Rp. 100.000.000 sebanyak 100 siswa.

**Upaya yang akan dilakukan Dinas Pendidikan terhadap peningkatan capaian angka partisipasi murni SMP/MTs.**

1. Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung upaya peningkatan APM SMP/MTs.
2. Merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mengembangkan kurikulum yang relevan dan menarik bagi siswa.
3. Mengupayakan pendidikan inklusif yang menyediakan kesempatan bagi semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus atau dari kelompok marginal.

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

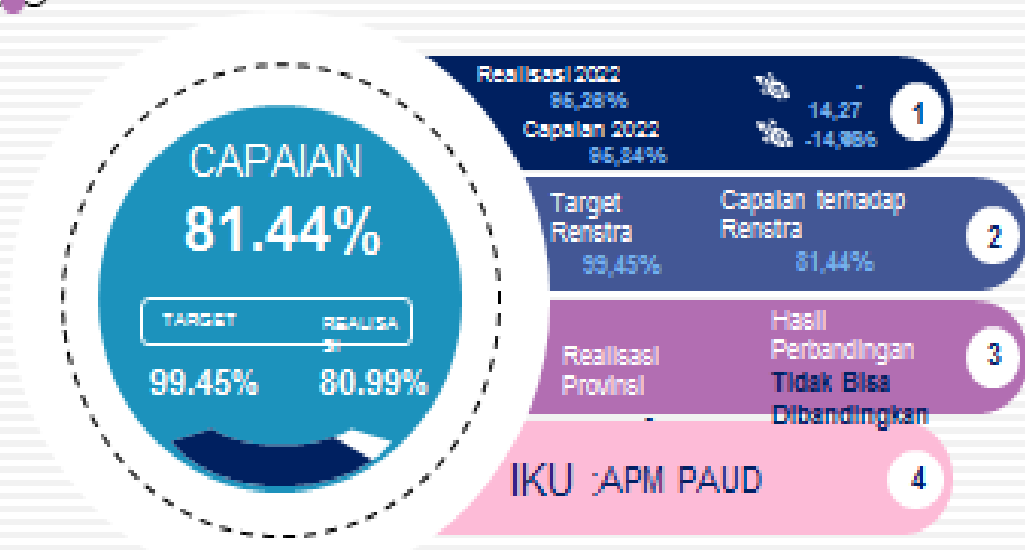
No.	Program	Pengampu	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang SMP	83.430.457.248

7. Efisiensi sumber daya

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator angka partisipasi murni SMP/MTs pada sasaran meningkatnya mutu pendidikan tidak ada karena IKU hanya mencapai 86,37%.



# MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN



**FAKTOR**

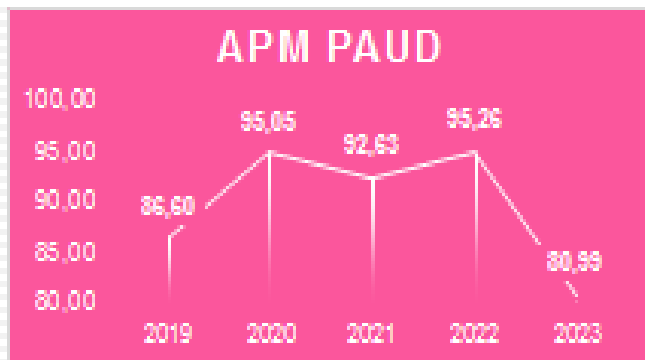
- Ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan yang memadai dan mudah diakses
- Kualitas pengajaran di sekolah
- Penyediaan dukungan finansial/pemberian bantuan kepada siswa dari keluarga miskin
- program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, kurikulum yang relevan dan menarik bagi siswa

□ Program Pengelolaan Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini)

**PROGRAM**

**EFISIENSI**

Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis Ini tidak ada karena IKU tidak tercapai







• **Angka Partisipasi Murni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah sebuah indikator yang digunakan dalam bidang pendidikan untuk mengukur proporsi atau persentase populasi usia sekolah yang berada pada tingkat pendidikan tertentu, dibandingkan dengan total populasi usia sekolah di suatu negara atau wilayah pada tahun tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD merujuk pada persentase atau proporsi anak-anak pendidikan usia dini yang berpartisipasi aktif dalam sistem pendidikan pada tingkat PAUD. Dalam istilah sederhana, APM PAUD mengukur seberapa banyak anak pendidikan usia dini (usia 5-6 tahun) yang mengikuti pendidikan dibandingkan dengan total populasi anak usia 5-6 tahun dalam suatu wilayah atau negara pada suatu periode waktu tertentu.

APM PAUD dijadikan salah satu indikator kinerja utama Dinas Pendidikan kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Renstra Perubahan Dinas Pendidikan periode 2018-2023. Adapun target yang dibebankan pada setiap tahun perencanaan selalu ditingkatkan.

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	99,45	80,99	81,44%

Capaian Angka Partisipasi Murni PAUD kabupaten Majalengka pada tahun 2023 sebesar 81,44%, dengan realisasi sebesar 80,99 dari target 99,45.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	80,99	95,26	-14,27

Bila dibandingkan realisasi Angka Partisipasi Murni PAUD tahun 2023 dengan tahun 2022 mengalami penurunan realisasi sebesar 14,27. Hal ini dikarenakan perbedaan formulasi, pada



tahun 2022 untuk pembilang yaitu jumlah siswa keseluruhan sementara tahun 2023 berdasarkan jumlah siswa berdasarkan usia 5-6 tahun. Adapun target yang dibebankan pada setiap tahun perencanaan selalu ditingkatkan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan tahun 2018-2023.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	81,44	95,84	-14,4

Bila dibandingkan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun 2022, angka partisipasi murni APM PAUD juga mengalami penurunan 14,4.

### 3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	80,99	99,45	81,44 %

Jika membandingkan realisasi angka APM PAUD tahun 2023 dengan Renstra tahun 2018-2023 capaian tahun 2023 sudah mencapai 81,44% dengan kondisi akhir sebesar 99,45.

### 4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/ Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	80,99	Tidak bisa dibandingkan	-



Capaian APM PAUD daerah tidak bisa dibandingkan dengan APM PAUD propinsi hal ini dikarenakan adanya perbedaan skala dan populasi serta perbedaan kebijakan antara propinsi dan daerah.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan capaian angka partisipasi murni PAUD.**

1. Ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan yang memadai dan mudah diakses, seperti sekolah, kelas, perpustakaan, dan sarana belajar lainnya, dapat mendorong partisipasi siswa.
2. Kualitas pengajaran di sekolah dengan menyediakan guru yang terlatih dan berkualitas dapat meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran.
3. Memberikan bantuan keuangan, seperti beasiswa atau bantuan pendidikan, kepada keluarga yang membutuhkan dapat membantu mengatasi kendala ekonomi yang mungkin menjadi hambatan partisipasi.
4. Merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mengembangkan kurikulum yang relevan dan menarik bagi siswa.

**Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan terhadap peningkatan capaian angka partisipasi murni PAUD.**

1. Pembangunan sarana prasarana pendidikan seperti ruang kelas baru dengan anggaran Rp.1.620.661.000 sebanyak 9 ruang , pembangunan sarana utilitas sebesar Rp. 782.180.550 sebanyak 7 ruang.
2. Rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas pendidikan yang memadai dengan anggaran Rp. 643.387.450 sebanyak 6 ruang.
3. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa dengan anggaran Rp. 14.880.000.000 sebanyak 81 paket.



4. Mengadakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD dengan anggaran Rp. 17.850.000 sebanyak 100 orang.

5. Memberikan bantuan perlengkapan bagi siswa dari keluarga miskin sebesar Rp. 170.500.000 untuk 1550 siswa.



**Upaya yang akan dilakukan Dinas Pendidikan terhadap peningkatan capaian angka partisipasi murni PAUD .**

1. Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung upaya peningkatan APM PAUD.
  2. Merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mengembangkan kurikulum yang relevan dan menarik bagi siswa.
  3. Menyediakan fasilitas pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus seperti penyediaan guru yang sudah mengikuti pelatihan khusus dan pemberian bantuan alat khusus.
6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

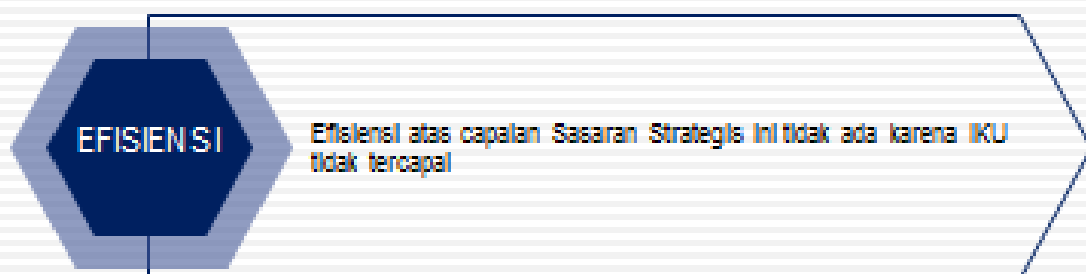
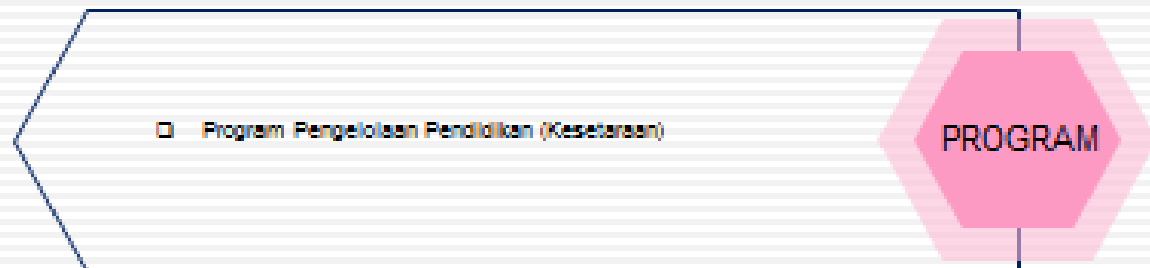
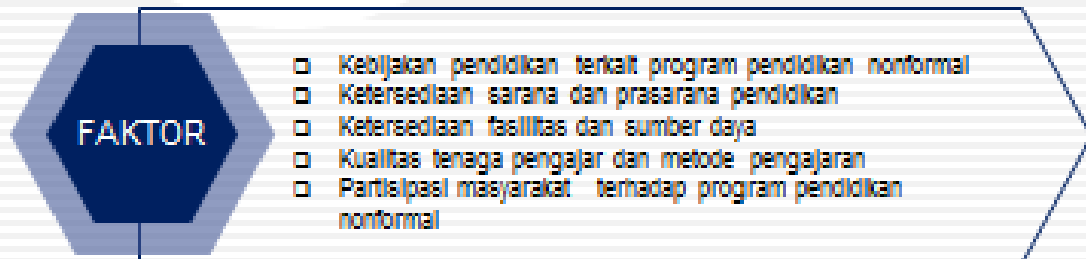
No.	Program	Pengampu	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang PAUD	41.379.411.100

7. Efisiensi sumber daya

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator angka partisipasi murni APM PAUD pada sasaran meningkatnya mutu pendidikan tidak ada karena IKU hanya mencapai 81,44%.



# MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN





• **Angka Partisipasi Kasar (APK) Nonformal/Kesetaraan**

Angka Partisipasi Kasar (APK) Nonformal mengukur persentase populasi dalam suatu usia tertentu yang berpartisipasi dalam pendidikan nonformal dibandingkan dengan total populasi dalam usia tersebut. Pendidikan nonformal mencakup berbagai program dan kegiatan pendidikan yang tidak termasuk dalam sistem pendidikan formal, seperti kursus pelatihan, program kecakapan hidup, atau pendidikan berbasis masyarakat.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Nonformal/Kesetaraan merujuk pada persentase atau proporsi anak-anak pendidikan nonformal yang berpartisipasi aktif dalam sistem pendidikan pada tingkat paket A, paket B dan paket C. Dalam istilah sederhana, APK Nonformal mengukur seberapa banyak anak pendidikan usia 7-18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan (Paket A, paket B, paket C) dibandingkan dengan total populasi penduduk usia 7-18 tahun dalam suatu wilayah atau negara pada suatu periode waktu tertentu.

APK dijadikan salah satu indikator kinerja utama Dinas Pendidikan kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam Renstra Perubahan Dinas Pendidikan periode 2018-2023 yang setiap tahunnya . Adapun target yang dibebankan pada setiap tahun perencanaan selalu ditingkatkan.

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Nonformal	86,55	44,22	51,09%

Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Nonformal kabupaten Majalengka pada tahu 2023 sebesar 51,09%, dengan realisasi sebesar 44,22 dari target 86,55.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan/ Penurunan
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Nonformal	44,22	97,64	-53,42



Bila dibandingkan realisasi Angka Partisipasi Kasar Nonformal/Kesetaraan tahun 2023 dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 53,42.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2022	Peningkatan / Penurunan
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Nonformal	51,09	113	-61,91

Bila dibandingkan capaian tahun 2023 dengan capaian tahun 2022, angka partisipasi kasar (APK) Nonformal juga mengalami penurunan sebesar 61,91. Hal ini karena adanya perubahan juknis formulasi dimana data jumlah siswa kesetaraan yang dihitung berdasarkan usia 7-18 tahun yang sebelumnya berdasarkan usia 7-25 tahun sementara jumlah siswa kesetaraan sebagian besar berada pada range usia >18 tahun. Sehingga perbandingan capaian APK tahun 2023 dinilai mengalami penurunan sebesar 61,91 dengan capaian tahun 2022.

### 3. Perbandingan Realisasi 2023 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Nonformal	44,22	86,55	51,09 %

Jika membandingkan realisasi APK Nonformal tahun 2023 dengan Renstra tahun 2018-2023 capaian tahun 2023 hanya mencapai 51,09% dengan kondisi akhir sebesar 86,55 hal ini belum mencapai hasil sesuai target dikarenakan ada perubahan juknis formulasi angka partisipasi siswa kesetaraan.



4. Perbandingan Realisasi 2023 dengan rata-rata/standar Provinsi/Nasional.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Rata-rata Provinsi/Nasional	Hasil Perbandingan
Meningkatnya mutu pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Nonformal	44,22	Tidak bisa dibandingkan	-

Capaian APK (Angka Partisipasi Kasar) kesetaraan di tingkat provinsi tidak dapat langsung dibandingkan dengan capaian APK kesetaraan di tingkat daerah dikarenakan kebijakan dan prioritas pendidikan antara propinsi dan daerah berbeda juga adanya perbedaan skala dan populasi yang berbeda dapat berdampak signifikan pada angka partisipasi kesetaraan.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya.

**Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan capaian angka partisipasi kasar nonformal/kesetaraan.**

1. Kebijakan pendidikan yang mendukung dan mendorong pengembangan program pendidikan nonformal.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Ketersediaan fasilitas dan sumber daya seperti buku, perangkat pembelajaran, dan sarana pendukung lainnya.
4. Tingkat dukungan dan partisipasi keluarga dan komunitas terhadap program pendidikan nonformal.
5. Kualitas tenaga pengajar dan metode pengajaran yang memotivasi dan mendukung peserta.





**Upaya yang telah dilakukan Dinas Pendidikan terhadap peningkatan capaian angka partisipasi kasar nonformal /kesetaraan.**

1. Menyediakan perlengkapan pendidikan nonformal/kesetaraan dengan anggaran Rp.150.000.000 sebanyak 20 paket.
2. Menyediakan tenaga pendidik/tutor pendidikan nonformal/kesetaraan dengan anggaran Rp. 213.600.000 untuk 130 tutor.



Kegiatan pembelajaran di LPK



3. Menyelenggarakan sosialisasi pendidikan nonformal dengan anggaran Rp. 78.400.000 sebanyak 134 Lembaga
4. Mengadakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan nonformal/kesetaraan dengan anggaran Rp. 34.960.000 sebanyak 102 peserta.



Kegiatan siswa kesetaraan di tk propinsi



**Upaya yang akan dilakukan Dinas Pendidikan terhadap peningkatan capaian angka partisipasi kasar nonformal/kesetaraan .**

1. Meningkatkan aksesibilitas untuk pendidikan nonformal. melalui pendidikan nonformal, Dinas Pendidikan dapat memberikan kesempatan pendidikan kepada mereka yang sulit dijangkau oleh sistem formal, seperti orang dewasa yang ingin melanjutkan pendidikan, anak-anak yang keluar dari sistem formal, atau kelompok-kelompok khusus seperti penyandang disabilitas.
  2. Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung upaya peningkatan APK Nonformal/Kesetaraan.
  3. Merancang program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan mengembangkan kurikulum yang relevan dan menarik bagi siswa.
6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan

No.	Program	Pengampu	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Bidang PAUDDIKMAS	13.451.815.000

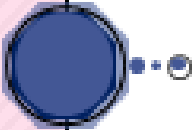
7. Efisiensi sumber daya

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator angka partisipasi murni APK Nonformal/Kesetaraan pada sasaran meningkatnya mutu pendidikan tidak ada karena IKU hanya mencapai 51,09%.

**3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Meningkatnya mutu Pendidikan	RLS	100,08	98,13
2		HLS	100	97,24
3		APM SD/MI	93,38	97,72
4		APM SMP/MTs	86,37	99,24
5		APM PAUD	81,44	99,90
6		APK Nonformal	51,09	97,24



# **BAB 4**

## **KESIMPULAN**



## **BAB IV PENUTUP**

Secara umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Majalengka telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ditandai dengan telah dilaksanakannya pemeriksaan reguler dan pelaporan hasil pemeriksaannya sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023. Disamping itu, seluruh kegiatan baik penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah, penanganan kasus pada wilayah pemerintah di bawahnya, tidak lanjut hasil temuan pengawasan, koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, evaluasi LKIP, monitoring dan evaluasi bantuan-bantuan, review atas laporan keuangan pemerintah daerah, dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dapat dikategorikan relatif baik atau berhasil, hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka yang dilakukan melalui kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dapat dilaksanakan.

Capaian keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan didukung oleh berbagai faktor yang berperan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam bidang pendidikan diantaranya kebijakan pendidikan yang baik dan efektif menjadi landasan untuk mengarahkan langkah-langkah dan program-program dalam mencapai sasaran pendidikan. Kebijakan yang jelas, terarah, dan berbasis pada bukti dapat memberikan panduan yang kuat bagi Dinas Pendidikan.

Meningkatkan aksesibilitas untuk pendidikan nonformal. Melalui pendidikan nonformal, Dinas Pendidikan dapat memberikan kesempatan pendidikan kepada mereka yang sulit dijangkau oleh sistem formal. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di Dinas Pendidikan, termasuk kepala dinas, staf, guru, dan tenaga pendidik lainnya, sangat berpengaruh pada implementasi program dan keberhasilan kinerja. Untuk itu perlu adanya peningkatan karena sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu menyusun dan melaksanakan program dengan baik.

Serta dengan meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua warga, terutama kelompok marginal atau kurang mampu,

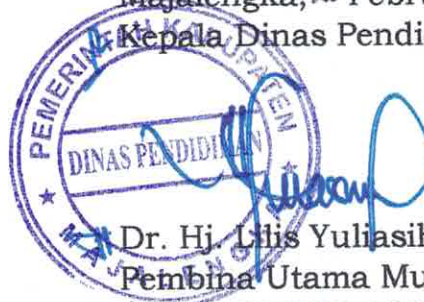


adalah kunci untuk meningkatkan capaian dan kinerja dinas pendidikan.

Selain daripada itu Dinas Pendidikan juga berupaya membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, untuk mendukung dan melaksanakan program pendidikan.

Majalengka, 26 Pebruari 2023

Kepala Dinas Pendidikan,



Dr. Hj. Lilis Yuliasih, M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19640730 198512 2 001

# **LAMPIRAN**



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Hj. LILIS YULIASIH, M.Pd.**  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**  
Jabatan : Bupati Majalengka  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

  
Pihak Kedua,  
  
**Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Majalengka, 01 Nopember 2023

  
Pihak Pertama,  
  
**Dr. Hj. LILIS YULIASIH, M.Pd.**  
NIP. 19640730 198512 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
DINAS PENDIDIKAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	7,52 Nilai
		Harapan Lama Sekolah	12,25 Nilai
		APM SD/MI	97,35 %
		APM SMP/MTs	98,55 %
		APM PAUD	99,45 %
		APK Kesetaraan	86,55 %

Program		Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 498.603.165.003,00	APBD
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 525.220.786.370,00	Dekonsentrasi/DAU/ Bankeu
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 1.023.823.951.373,00</b>	



Bupati Majalengka,  
**Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

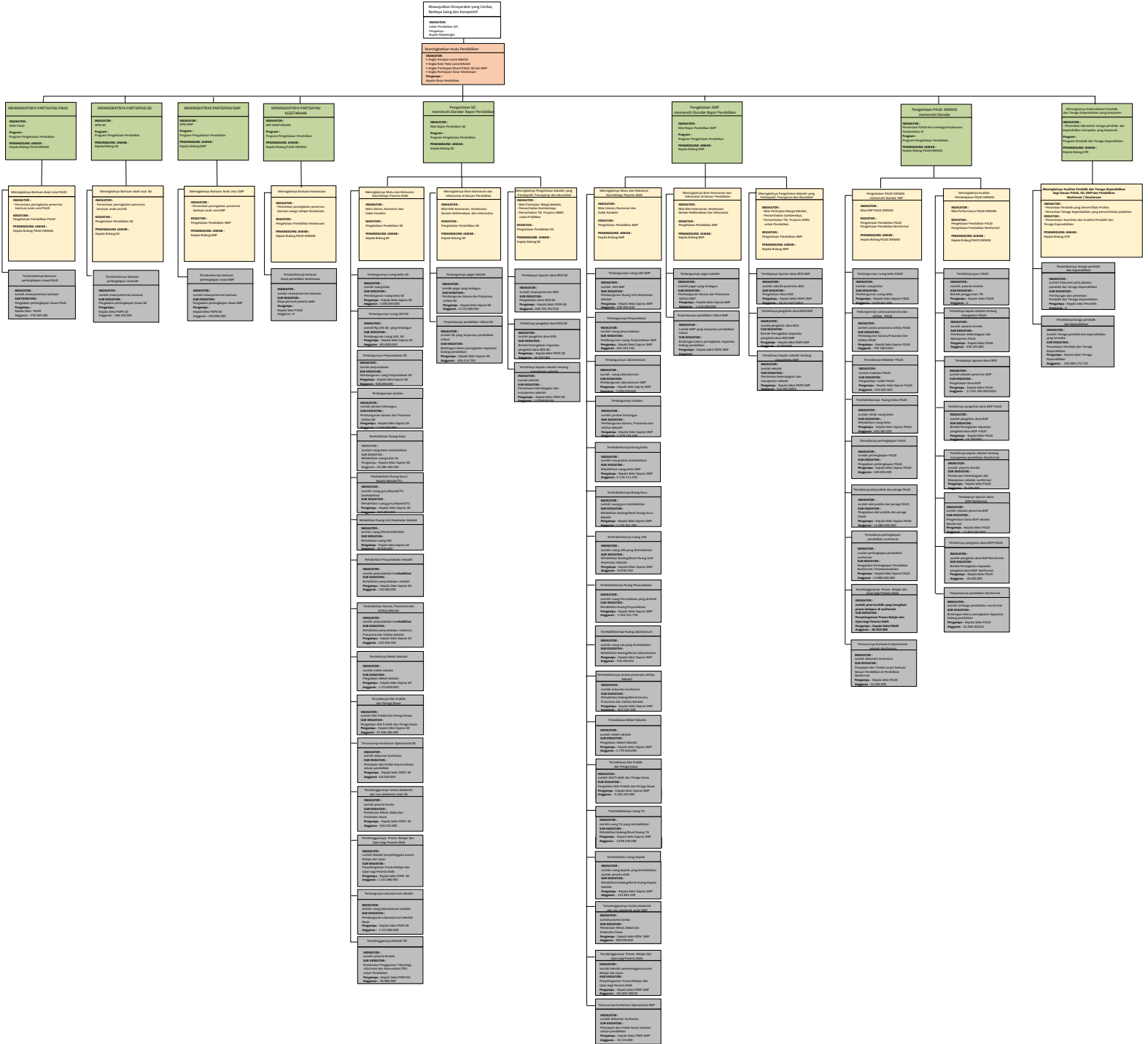
Majalengka, 01 Nopember 2023



Kepala Dinas Pendidikan,  
**Dr. Hj. LILIS YULIASIH, M.Pd.**  
NIP. 19640730 198512 2 001



Pohon Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2023  
Kabupaten Majalengka







PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. K. H. Abdul Halim Nomor 233 Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka  
45418

Telp. (0233) 281097 Faks.(0233) 281097 Pos-el [disdikmajalengkakab@gmail.com](mailto:disdikmajalengkakab@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 000.8.6.3 / 60 / Sekret

TENTANG

PENETAPAN KEPUTUSAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Bahwa dalam implementasi kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dibutuhkan adanya penambahan aktivitas sehingga perlu adanya penambahan kegiatan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu dilakukan Pembentukan Tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenMajalengka.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Intruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri.....2

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Kepmendagri nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan;
10. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2016 nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 12 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2019 nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :.....3

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka setiap Tahun Anggaran selama 1 (Satu) tahun.
- KETIGA : Tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka adalah Dokumen Pertanggung Jawaban OPD untuk periode 1 (Satu) tahun sebagai penentu program dan kegiatan prioritas untuk Tahun 2023, dengan memiliki keselarasan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka

Pada Tanggal : 20 Februari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAJALENGKA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA  
Nomor : 000.8.6.3 / 60 / Sekret  
Tanggal : 20 Februari 2024  
Tentang : Pembentukan Tim penyusun  
Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah (LKIP)

TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sukiman, S.Sos NIP.197102121994031002	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	H. Joko Setiyono, M.Kom. NIP. 197910182014081002	Perencana Ahli Muda	Ketua
3.	Nining Dwi Pujaningsih, S.M. NIP. 197312302014062002	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
4.	Fazri Rahmatika, S.E. NIP. 199311192022031006	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAJALENGKA



Lilis Yuliasih

# PENGHARGAAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH

**Dinas Pendidikan**  
Kabupaten Majalengka

*Selamat & Sukses*  
Kepada  
**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**  
atas diraihnya  
**PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH**  
**TAHUN 2023**  
dengan **NILAI 91,89 (ZONA HIJAU)**

Tahun	Nilai	Zona
2021	48	MASIH MASUK ZONA MERAH
2022	68	MASUK ZONA KUNING
2023	91,89	MASUK ZONA HIJAU

**Dr. Hj. Lilis Yuliasih, M.Pd.**  
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Majalengka

**DISDIK, CERDAS, BERKARAKTER**

# PRESTASI AJANG KOMPETENSI SISWA TINGKAT PROPINSI DAN NASIONAL





# Piagam Penghargaan

No : 1043572/P/BI/NOSC/VIII/2023

PIAGAM INI DIBERIKAN KEPADA

**TALIA HAYYU RAFFIAH**

SMP NEGERI 2 JATITUJUH

Prov. Jawa Barat

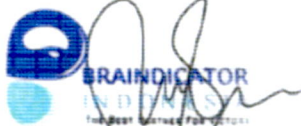
Matematika

SMP dan MTs

atas partisipasinya di ajang kompetisi tingkat nasional bertajuk  
**NOSeC (National Outstanding Student e-Competition)** tahun 2023,  
pada tanggal 27 Agustus 2023 di Jawa Tengah dengan predikat **A+**, sebagai

**PERAIH MEDALI EMAS**

Direktur



Rizki Wahyu Pangestu, S.T



Ketua Panitia



Audri Adelia Ainurahma

Verifikasi Keaslian Dokumen



# SEBARAN INFORMASI LKIP DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2023

